



**ANALISIS PENGARUH DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL, DANA  
PERIMBANGAN, DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP *ISLAMIC HUMAN  
DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)*  
PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA  
TAHUN 2018-2023**



**SIGIT PRAMONO**  
**NIM. 50423006**

**2025**

**ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL,  
DANA PERIMBANGAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)*  
PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023**



**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (M.E.)**

**Oleh:**

**SIGIT PRAMONO**

**NIM. 50423006**

**PASCASARJANA PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL,  
DANA PERIMBANGAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)*  
PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023.**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (M.E.)**



Oleh:  
**SIGIT PRAMONO**  
50423006

Pembimbing:  
**Prof. Dr. H. IMAM KANAFI, M.Ag.**  
NIP. 197511201999031004

**Dr. HENDRI HERMAWAN ADINUGRAHA, M.S.I**  
NIP. 198703112019081001

**PASCASARJANA PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Sigit Pramono

NIM. 50423006

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang  
Tesis Kepada:  
Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Cq Direktur Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

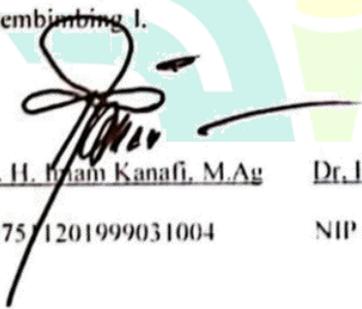
NAMA : SIGIT PRAMONO  
NIM : 50423006  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Semester : IV (Empat)  
Judul : ANALISIS PENGARUH DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL, DANA  
PERIMBANGAN, DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI TERHADAP *ISLAMIC HUMAN  
DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)* PADA 8  
PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-  
2023.

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.W.b.*

Pembimbing I.

Pekalongan, 10 Ferbruari 2025  
Pembimbing II.

  
Prof. Dr. H. Hani Kanafi, M.Ag

  
Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I

NIP : 19751201999031004

NIP : 198703112019081001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sigit Pramono

Nim : 50423006

Program studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul tesis : Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan,  
Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Islamic Human Development*  
*Index (I-HDI)* Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk di ajukan ke sidang panitia ujian  
Tesis Program Magister

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag NIP. 197511201999031004		13 / 02 / 2025
Pembimbing 2	Dr. Hendri Hermawan, M.S.I NIP. 198703112019081001		12 / 02 / 2025

Pekalongan, 10 Februari 2025

Mengetahui:

a.n Direktur

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah

  
Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, DANA PERIMBANGAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI) PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023" yang disusun oleh:

Nama : Sigit Pramono

NIM : 50423006

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 27 Februari 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag		11/3-2025
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I		11/3-2025
Penguji Utama	Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M		10/3-2025
Penguji Anggota	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I		11/3-2025



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 197101151998031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شىءى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

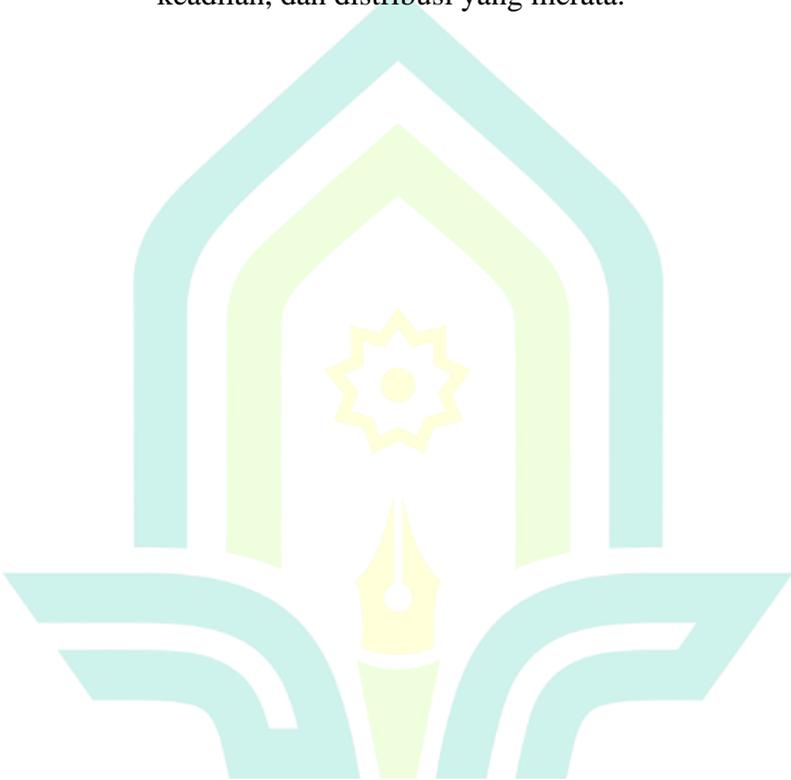
1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## MOTTO

"Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud tanpa usaha dan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Farabi, 'Negara yang ideal adalah yang pemimpinnya mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.' Maka, perjuangan menuju kemakmuran harus berlandaskan kebijaksanaan, keadilan, dan distribusi yang merata."



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan tugas akhir Tesis ini, meskipun dengan segala keterbatasannya. Saya bersyukur kepada-Mu, ya Allah, atas kehadiran orang-orang istimewa di sekitar saya yang tak henti memberikan dukungan moral dan doa. Berkat pertolongan-Mu melalui mereka, saya mampu menuntaskan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk

1. Untuk ibu dan bapakku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Seluruh kakak-kakak ku dan seluruh sepupu ku
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

## ABSTRAK

Sigit Pramono, 2025, Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag. II. Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.

Kata Kunci : *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Derajat Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, *Generalized Method of Moments* (GMM)

*Islamic Human Development Index* (I-HDI) merupakan indeks yang dirancang berdasarkan berbagai indikator yang berakar pada konsep lima kebutuhan pokok dalam *Maqashid al-Syariah* yaitu indeks agama (*index ad-din*), indeks jiwa (*index an-nafs*), indeks akal (*index al-aql*), indeks keturunan (*index an-nasl*), dan indeks harta (*index al-maal*) sehingga lebih relevan dalam menilai pembangunan manusia dari perspektif Islam.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023?. (2) Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023?. (3) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023?.

Tujuan penelitian adalah : (1) Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023. (2) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023. (3) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi panel dinamis metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dengan bantuan perangkat lunak Stata 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. (2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. (2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.



## **ABSTRACT**

*Sigit Pramono, 2025, Analysis of the Influence of the Degree of Fiscal Decentralisation, Balancing Funds, and Economic Growth on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 Provinces in Indonesia in 2028-2023. Thesis, Sharia Economics Master's Study Program, Postgraduate, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag. II. Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.*

*Keywords: Islamic Human Development Index (I-HDI), Degree of Fiscal Decentralization, Balancing Funds, Economic Growth, Generalized Method of Moments (GMM)*

*The Islamic Human Development Index (I-HDI) is an index designed based on various indicators rooted in the concept of the five basic needs in Maqashid al-Syariah, namely the religious index (ad-din index), the soul index (an-nafs index), the reason index (index al-aql), the hereditary index (index an-nasl), and the wealth index (index al-maal), so that they are more relevant in assessing human development from an Islamic perspective.*

*The formulation of the research problem is: (1) What is the influence of the degree of fiscal decentralisation on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023?. (2) What is the influence of balancing funds on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023?. (3) What is the influence of economic growth on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023?.*

*The research objectives are: (1) Analyse the influence of the degree of fiscal decentralization on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023. (2) Analysing the influence of economic growth on*

*the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia from 2018-2023. (3) Analysing the influence of economic growth on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia, 2018-2023. This research is explanatory research with a quantitative approach. The data used in this research is secondary data. The data analysis technique applied is dynamic panel regression analysis using the Generalised Method of Moments (GMM) method with the help of Stata 17 software.*

*The results of this research show (1) the degree of fiscal decentralization does not have a significant effect in the short and long term on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023. (2) The Balancing Fund has a significant negative effect in the short and long term on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023. (2) Economic growth has a significant negative effect in the short and long term on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 provinces in Indonesia in 2018-2023.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah- mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumul akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
3. Dr. Ali Muhtarom M.H.I. selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
4. Prof.Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag. selaku pembimbing I dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

5. Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dan juga dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 10 Februari 2025



Sigit Pramono

## DAFTAR ISI

.PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GRAFIK .....	xxv
DAFTAR GAMBAR .....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Pembatasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian .....	17
1.6 Manfaat Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Deskripsi Teoretik.....	20
2.3 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan (Telaah Pustaka) .....	44
2.4 Kerangka Berfikir .....	60
2.5 Hipotesis Penelitian .....	64
BAB III METODELOGI PENELITIAN .....	66
3.1 Objek Penelitian .....	66
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	66

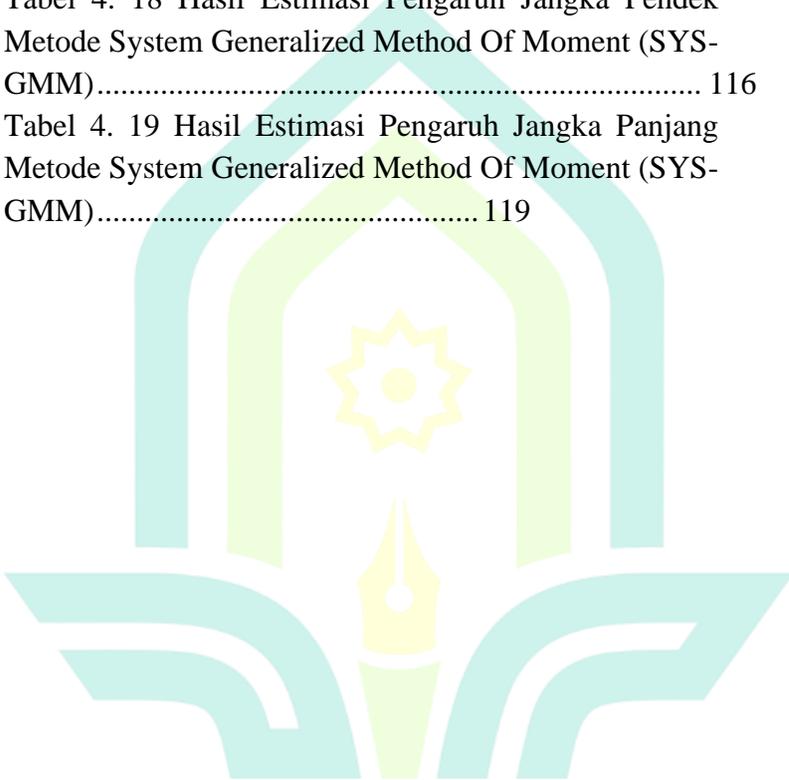
3.3	Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel .....	67
3.4	Spesifikasi Model Penelitian .....	68
3.5	Metode Analisis Data Penelitian .....	70
3.6	Teknik Analisis Data .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	77
4.2	Perkembangan Variable Penelitian .....	77
4.3	Statistik Deskriptif Data Penelitian .....	110
4.4	Hasil Uji <i>System Generalized Method Of Moment</i> (SYS-GMM) .....	112
4.5	Pembahasan Hasil Analisis .....	122
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ...</b>	<b>132</b>
5.1	Kesimpulan Hasil Penelitian .....	132
5.2	Keterbatasan Hasil Penelitian .....	133
5.3	Implikasi Hasil Penelitian .....	135
5.4	Saran .....	138
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>151</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>159</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiska (DDF) .....	35
Tabel 2. 2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik.....	43
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.....	67
Tabel 4.1 Indikator Perhitungan Indeks Agama (ID) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.....	78
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Indeks Agama (ID) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2028.....	79
Tabel 4. 3 Indikator Perhitungan Indeks Jiwa (INF) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.....	82
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Indeks Jiwa (INF) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023.....	83
Tabel 4. 5 Indikator Perhitungan Indeks Akal (IA) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.....	86
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Indeks Akal (IA) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023.....	87
Tabel 4. 7 Indikator Perhitungan Indeks Keturunan (INS) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 .....	90
Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Indeks Katurunan (INS) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 .....	91
Tabel 4. 9 Indikator Perhitungan Indeks Harta (IM) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.....	95
Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan Indeks Harta (IM) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2022.....	96
Tabel 4. 11 Data Hasil Perhitungan Islamic Human Development Index (I-HDI) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin).....	99
Tabel 4. 12 Data Derajat Desentralisasi Fiskal Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen) .....	103
Tabel 4. 13 Data Dana Perimbangan Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah).....	105

Tabel 4. 14 Data Pertumbuhan ekonomi Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen).....	108
Tabel 4. 15 Data Statistik Deskriptif Penelitian .....	111
Tabel 4. 16 Hasil Uji Sargan Dengan Pendekatan SYS-GMM .....	114
Tabel 4. 17 Hasil Uji Arellano-Bond Dengan Pendekatan SYS-GMM.....	115
Tabel 4. 18 Hasil Estimasi Pengaruh Jangka Pendek Metode System Generalized Method Of Moment (SYS-GMM).....	116
Tabel 4. 19 Hasil Estimasi Pengaruh Jangka Panjang Metode System Generalized Method Of Moment (SYS-GMM).....	119



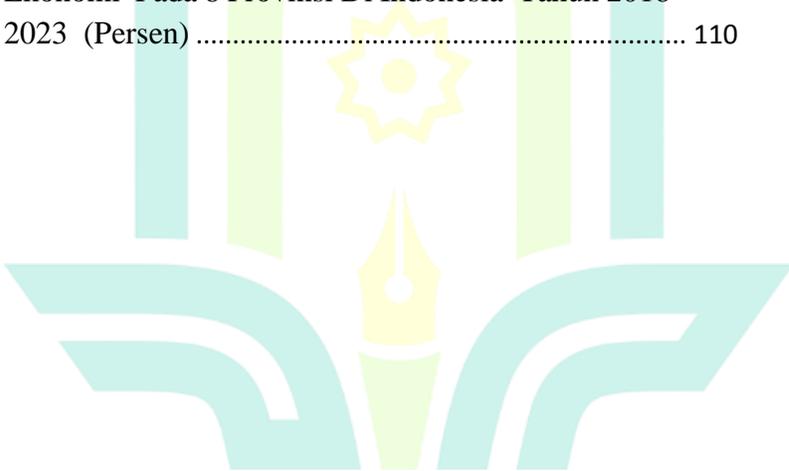
## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Data IPM Nasional Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin).....	3
Grafik 1. 2 Tampilan Informasi Presentase IPM Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018–2023 .....	5
Grafik 1. 3 Data IPM Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin).....	6
Grafik 1. 4 Data Rata-Rata I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin).....	9
Grafik 1. 5 Data Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen) .....	10
Grafik 1. 6 Data Rata-Rata Dana Perimbangan Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah) .....	12
Grafik 1. 7 Data Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen) ....	14



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indikator dan dimensi IPM.....	22
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir .....	60
Gambar 4. 1 Data Rata-rata Agregat Islamic Human Development Index (I-HDI) Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin).....	101
Gambar 4. 2 Data Rata-rata Agregat Derajat Desentralisasi Fiskal Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen).....	104
Gambar 4. 3 Data Rata-rata dana Perimbangan Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah).....	107
Gambar 4. 4 Data Rata-rata Agregat Pertumbuhan Ekonomi Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen) .....	110



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak tahun 1996, *Human Development Index* (HDI) atau disebut juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah dirancang dan dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui sekumpulan laporan kinerja tahunan yang dikenal dengan *Human Development Report*. UNDP tidak hanya menilai pembangunan suatu negara berdasarkan pendapatan nasional per kapita, tetapi juga Indeks Pembangunan Manusia sebagai proses memperluas pilihan masyarakat, yang digunakan untuk indikator alternatif dalam parameter keberhasilan pembangunan pada suatu negara. IPM didasarkan pada tiga dimensi utama, yang pertama adalah dimensi umur panjang dan kesehatan, yang diukur melalui indikator harapan hidup rata-rata penduduk di suatu negara. Kedua yaitu pada dimensi pengetahuan, dan dievaluasi berdasarkan rata-rata tingkat literasi orang dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). Ketiga yaitu dimensi standar hidup yang layak, yang diukur menggunakan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan terhadap tingkat daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) (Putu Gede Mahendra Putra, 2015).

Salah satu metode yang diaplikasikan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan suatu negara adalah melalui IPM. Konsep IPM pertama kali dikembangkan oleh Mahbub ul Haq, seorang ekonom asal Pakistan, dengan kontribusi pemikiran yang berasal dari Amartya Sen, peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi asal India. Proses pengembangan indeks ini juga mendapatkan

dukungan akademis dari Gustav Ranis, seorang ekonom dari Universitas Yale, serta Lord Meghnad Desai, seorang akademisi terkemuka yang memberikan kontribusi dalam penyempurnaan konsep tersebut (Todaro, 2011).

Gagasan pembangunan manusia yang menganggap manusia sebagai agen pembangunan mensyaratkan bahwa masyarakat di suatu negara atau wilayah mempunyai kesempatan untuk berumur panjang, hidup sehat, menerima pendidikan yang memadai, dan mampu menggunakan pengetahuan mereka untuk tujuan yang konstruktif. Pembangunan manusia sangat penting untuk mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan karena hal ini membuka lebih banyak pilihan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika individu berumur panjang, hidup sehat, memiliki keterampilan yang diperlukan, dan diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuannya (Feriyanto, 2014).

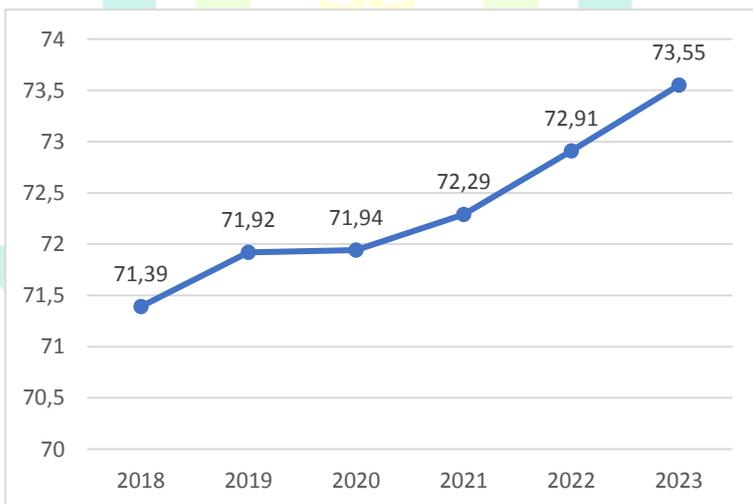
Intinya, tenaga kerja yang kompeten dan berpendidikan tinggi menciptakan landasan yang kuat bagi kemajuan yang terjadi lebih cepat dan berkelanjutan. Menurut Sacks, ketimpangan pendapatan menghambat pertumbuhan produktivitas yang cepat dan berkelanjutan serta kemajuan perekonomian di Amerika Latin dengan menghalangi sebagian orang memiliki akses terhadap kesehatan dan pendidikan karena sumber daya keuangan yang tidak mencukupi (Chapra, 2000).

Ketidakmampuan atau ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka selalu terjadi. Mereka tidak mampu mengendalikan nasibnya sendiri, bekerja secara produktif, mengakses sumber daya sosio-ekonomi, mengatasi diskriminasi sehari-hari, keluar dari kemiskinan mental dan budaya, dan terus-menerus kehilangan martabat dan

harga diri, yang merupakan beberapa dari kelemahan yang disebutkan di atas (Lincolin, 2010).

Badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi negatif, namun meskipun terjadi kemunduran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat setiap tahunnya. Namun pertumbuhan indeks tersebut belum mencapai level yang Hal ini menandakan bahwa pembangunan Indonesia harus mendapat prioritas utama. Pengutamaan pengembangan IPM Indonesia juga perlu dilakukan. Berikut perkembangan IPM di secara nasional di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2023:

**Grafik 1. 1 Data IPM Nasional Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah oleh peneliti) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024c)*

Grafik 1.1 IPM di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, IPM berada di angka 71,39 poin dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 73,55 poin pada tahun 2023. Selama periode ini, total kenaikan IPM adalah 2,16 poin. Kenaikan yang terjadi relatif stabil, meskipun pada tahun 2020, saat awal pandemi COVID-19, pertumbuhannya sedikit melambat dengan hanya naik 0,02 poin. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, kenaikan IPM menjadi lebih signifikan, masing-masing bertambah 0,35 poin, 0,62 poin, dan 0,64 poin. Berikut adalah data kategori interval IPM pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023:

**Tabel 1. 1 Data Interval IPM Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023**

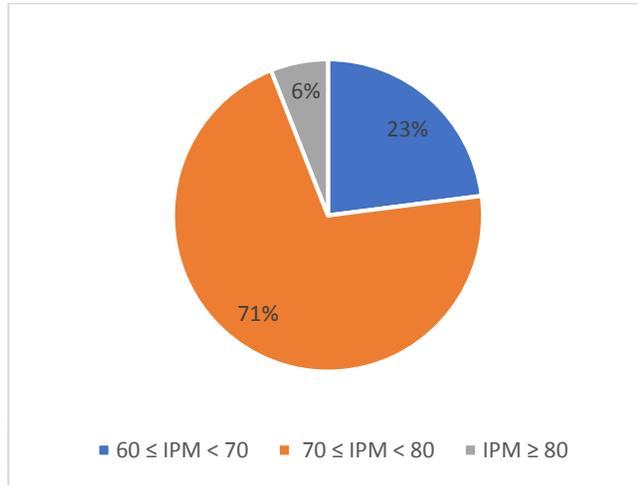
Kategori	Interval	Jumlah
Sangat tinggi	$IPM \geq 80$	2
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$	24
Sedang	$60 \leq IPM < 70$	8
Rendah	$IPM < 60$	-
Jumlah		34

*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah oleh peneliti) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024c)*

Data interval IPM 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023 diperoleh berdasarkan Tabel 1.1. Kategori sedang terdiri dari provinsi-provinsi yang berada pada interval  $60 \leq IPM < 70$ , kategori tinggi yang berada dalam interval  $70 \leq IPM < 80$  terdiri dari 24 Provinsi, dan kategori sangat tinggi yang berada dalam interval  $IPM \geq$

80 terdiri dari 2 Provinsi. Berikut adalah data presentase IPM 34 Provinsi di Indonesia:

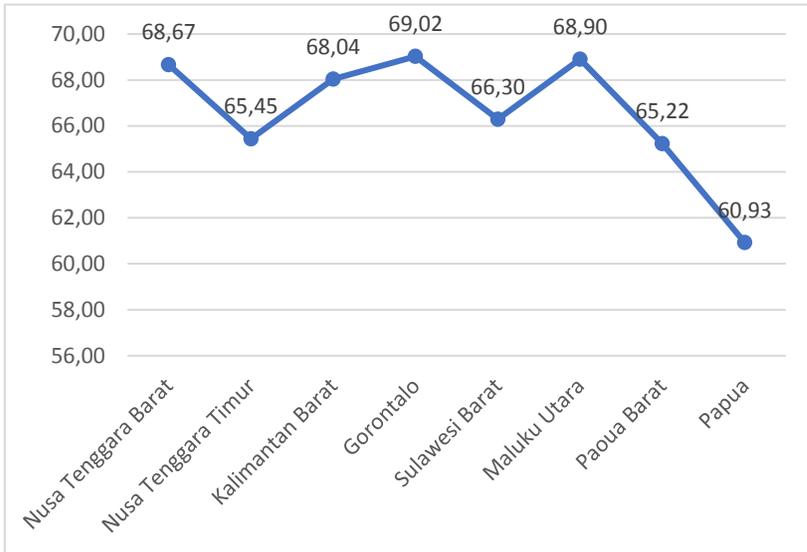
**Grafik 1. 2 Tampilan Informasi Presentase IPM Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018–2023**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah oleh peneliti) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024c)*

Berdasarkan data pada grafik 1.2 yang membandingkan IPM dari 34 provinsi di Indonesia, 23 persen provinsi berada di interval sedang, dengan kisaran IPM  $60 \leq \text{IPM} < 70$ . Sebanyak 71% provinsi masuk di interval tinggi kelompok ini didefinisikan memiliki IPM berada diantara  $70 \leq \text{IPM} < 80$ , sedangkan 6% provinsi masuk interval sangat tinggi. Berikut adalah Data rata-rata IPM pada 8 Provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

**Grafik 1. 3 Data IPM Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah oleh peneliti) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024c)*

Grafik 1.3 Data rata-rata IPM diatas dari 8 provinsi di Indonesia menunjukkan berada pada interval sedang, yaitu antara  $60 \leq \text{IPM} < 70$ . UNDP mengklasifikasikan hasil ini sebagai kategori IPM sedang. Provinsi Gorontalo memiliki rata-rata IPM tertinggi di kategori ini 69,02 poin, sedangkan Papua dengan rata-rata IPM terendah yaitu 60,93 poin.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengkajian pembangunan manusia yang lebih menyeluruh diperlukan, meskipun indeks pembangunan manusia sangat membantu dalam menangkap beberapa bagian dari pembangunan manusia (Anthony Hall, 2004). Meskipun IPM saat ini dianggap sebagai indikator yang paling komprehensif dalam mengukur pembangunan manusia,

penggunaannya dalam menilai pembangunan dari perspektif Islam masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya memadai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dasar konseptual IPM tidak berlandaskan pada *Maqashid al-Syariah*, yang merupakan inti dari tujuan utama dalam pembangunan menurut ajaran Islam (Anto, M., 2013).

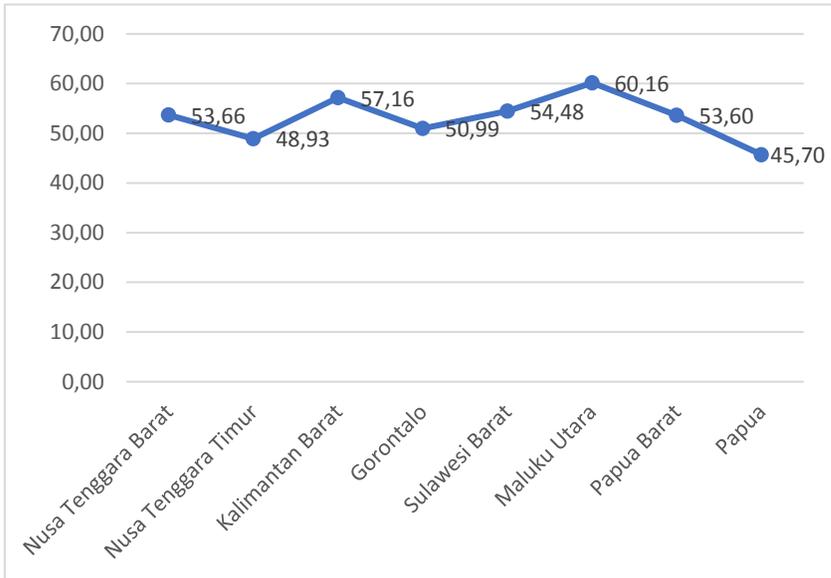
Menurut *Maqashid al-Syariah*, sistem pembangunan bergantung pada pembelajaran berkelanjutan. Gagasan tentang kedalaman, yang menyatakan bahwa manusia lebih dari sekadar objek di alam, dimaksudkan untuk membantu memanusiaikan manusia. Manusia adalah makhluk spiritual dengan pengalaman duniawi, dan ia juga memiliki kesadaran. Pandangan ini berpendapat bahwa fokus pembangunan telah bergeser dari ekstraksi dan akumulasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan berbagai ketidaksesuaian, kerusakan, dan kekacauan. Selain itu, menyebabkan manusia menjadi tidak manusiawi. Di sini, manusia dapat dipahami sebagai komponen utama pembangunan (Asmuni, 2014).

Dengan tercukupinya pendapatan penduduk, mereka dapat melakukan pembelian dan konsumsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi yang dimaksud lebih terfokus pada penegakan prinsip-prinsip ajaran syariah yang tujuan utamanya adalah tercapainya kemaslahatan. Hal inilah yang ingin dicapai oleh *Maqashid al-Syariah*. Mereka adalah ulama pertama, menurut al-Juwayni, yang menerapkan terminologi "*maqasid*" dan "*Masalih al-Ammah*", yang berarti "kemaslahatan umum". Di area publik, *Maslahah* menggabungkan prinsip-prinsip rasional normatif dan konstruktif yang biasanya diabaikan dalam pembangunan (Audah, 2013).

Mengingat penjelasan di atas bertujuan untuk mengukur derajat pencapaian kesejahteraan manusia, maka jelaslah bahwa *Maqashid al-Syariah* merupakan pendukung kuat terciptanya indeks pembangunan manusia. Meskipun demikian, indeks yang ada saat ini masih jauh dari evaluasi normatif Islam, khususnya yang bertumpu pada *Maqashid al-Syariah*. Hal ini terjadi akibat terlalu fokusnya indeks pada komponen material pembangunan dan mengabaikan kehidupan akhirat yang sangat penting. Karena hal itu, diperlukan suatu indeks yang bisa mengidentifikasi dimensi-dimensi yang relevan dengan *Maqashid al-Syariah* (Amir-Ud-Din, 2014).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Anto (2013) memperkenalkan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) diaplikasikan untuk alternatif indikator pembangunan manusia. I-HDI merupakan indeks yang dirancang berdasarkan berbagai indikator yang berakar pada konsep lima kebutuhan pokok dalam *Maqashid al-Syariah*, sehingga lebih relevan dalam menilai pembangunan manusia dari perspektif Islam. Memasukkan unsur-unsur yang bisa diukur seperti religiusitas, kebebasan, dan nilai-nilai kekeluargaan dalam pengukuran pertumbuhan manusia yang akurat merupakan hal yang sangat menantang karena karakter pembangunan dalam Islam yang beragam dan rumit. Namun I-HDI menggabungkan faktor persepsi dan kuantitatif. Ini menggabungkan sejumlah indikator, seperti indikator tunggal dan gabungan, stok dan aliran, serta input dan output. Karena sifat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan proksi yang terukur, meski menantang (Anto, M., 2013). Berikut adalah data rata-rata I-HDI pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023:

**Grafik 1. 4 Data Rata-Rata I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Poin)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (data diolah oleh peneliti)*

Menurut grafik 1.4, ada delapan Provinsi di Indonesia yang memiliki data rata-rata I-HDI dari tahun 2018 hingga 2023. Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata 45,32 poin, sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki nilai rata-rata 59,36 poin.

Ada beberapa ahli demografi yang berpendapat bahwa penyebab utama rendahnya I-HDI adalah variasi dalam akses terhadap hasil pembangunan ekonomi dan pertumbuhan. Ada kemungkinan bahwa itu juga karena proses kegiatan peningkatan pembangunan yang tidak sesuai. Meskipun inputnya cukup, outputnya tidak sesuai dengan harapan. I-HDI menunjukkan bahwa diperlukan uang untuk pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibat dari adopsi

sistem desentralisasi, atau otonomi daerah, sebagai pengganti model sentralisasi, diskusi tentang review pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari masalah desentralisasi ekonomi. Desentralisasi fiskal adalah komponen yang sangat penting dari desentralisasi ekonomi (Decta Pitron, 2013).

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai perencanaan, fungsi pemerintahan, pengalihan kewenangan, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang dipindahkan dari tingkat pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, organisasi semi-pemerintah, maupun sektor swasta. Dalam konteks *Islamic Human Development Index* (I-HDI), desentralisasi berperan untuk mendekatkan pemerintah terhadap masyarakat, yang pada gilirannya memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Turner & Hulme, 1997). Berikut adalah data rata-rata derajat desentralisasi fiskal pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023:

**Grafik 1. 5 Data Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)**



*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2024 (data diolah oleh penulis)(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2024b)*

Berdasarkan Grafik 1.5, rata-rata derajat desentralisasi fiskal di beberapa provinsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal tertinggi adalah Kalimantan Barat sebesar 42,41%, yang masuk dalam kategori cukup baik, sedangkan Papua Barat memiliki derajat desentralisasi fiskal terendah sebesar 9,61%, yang tergolong sangat kurang. Hal ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, di mana provinsi dengan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi memiliki ruang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah dibandingkan dengan provinsi yang tingkat desentralisasinya rendah.

Secara keseluruhan, mayoritas provinsi yang dianalisis berada dalam kategori cukup hingga kurang, mencerminkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di wilayah-wilayah tersebut, mengingat kapasitas fiskal yang terbatas dapat berdampak pada penyediaan layanan publik yang optimal. Oleh karena itu, upaya peningkatan otonomi fiskal dapat menjadi salah satu strategi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah dengan derajat desentralisasi fiskal rendah. Karena peningkatan kesejahteraan setiap orang pada dasarnya adalah tujuan utama kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, maka hal ini harus dilaksanakan secepatnya (Bappenas, 2007).

Strategi transfer antar pemerintah merupakan langkah pertama menuju desentralisasi fiskal. Pendanaan dan transfer berimbang digunakan sebagai sarana penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dana Perimbangan ini dihasilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), untuk didistribusikan ke seluruh daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam rangka rangka mengaplikasikan kebijakan desentralisasi. Tiga komponen utama gagasan dana perimbangan tidak berubah sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Siburian et al., 2021). Berikut adalah data rata-rata Dana Peimbangan pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023:

**Grafik 1. 6 Data Rata-Rata Dana Perimbangan Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah)**



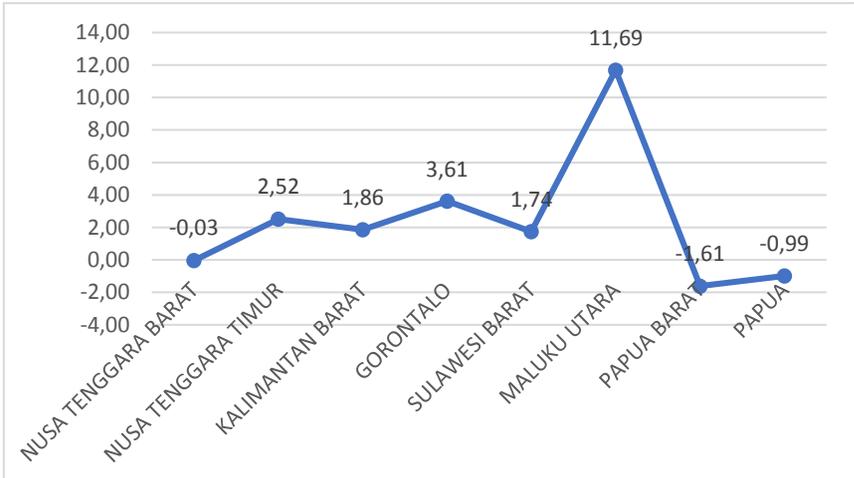
*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2024b)*

Berdasarkan pada grafik 1.6, data pada 8 Provinsi di Indonesia menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat selama periode 2018 hingga 2023. Provinsi Papua tercatat sebagai penerima Dana Perimbangan tertinggi dengan rata-rata sebesar Rp 5.725,64 miliar, sedangkan Provinsi Gorontalo menerima Dana Perimbangan terendah dengan rata-rata sebesar Rp 1.400,84 miliar. Dalam upaya mengurangi disparitas kemampuan keuangan antar daerah, pemerintah memanfaatkan dana perimbangan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pemerataan kapasitas fiskal di tingkat regional (Wardani, 2018). Sudut pandang sejalan dengan Olurankinse Felix (2012) agar pendanaan pemerintah untuk inisiatif pelayanan publik ditingkatkan. Berdasarkan dua pandangan di atas, pendanaan harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Dengan meningkatkan ruang publik dan sumber daya lainnya semaksimal mungkin, hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan fisik di sektor publik.

Lebih banyak pengeluaran dan transfer regional akan membantu perekonomian regional. Semakin banyak transfer dan dana perimbangan akan mendorong pembangunan infrastruktur perekonomian, yang pada akhirnya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karena semakin banyak pendapatan daerah berarti semakin banyak belanja daerah. Selanjutnya, dapat dilakukan pengamatan terhadap pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Berikut adalah data rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 8

Provinsi di Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

**Grafik 1. 7 Data Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024f)*

Berdasarkan pada grafik 1.6, disajikan data rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 8 Provinsi di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,69%, sedangkan Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan terendah sebesar -1,61%. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (2011), kemiskinan, pertumbuhan penduduk, produktivitas, tabungan, dan ketimpangan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang memiliki peran penting untuk menggerakkan

produktivitas dan daya saing di suatu wilayah (Todaro, 2011).

Berdasarkan situasi di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dalam kurun waktu 6 tahun berjudul “Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adanya beberapa masalah terkait dengan pengaruh derajat desentralisasi fiskal, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Poin IPM di 8 provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori sedang, dengan poin antara interval  $60 \leq \text{IPM} < 70$ .
2. IPM jika di *convert* menjadi I-HDI pada 8 Provinsi di Indonesia berada dalam interval  $\text{IPM} < 60$  kategori rendah.
3. Derajat desentralisasi fiskal pada 8 Provinsi di Indonesia besaran nilainya fluktuatif dan relatif kecil pada tahun ke tahun.
4. Di 8 Provinsi di Indonesia dana perimbangan besaran nilainya fluktuatif dari tahun ke tahun.
5. Di 8 Provinsi di Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda setiap tahunnya. Setiap provinsi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, beberapa memiliki tingkat yang sangat tinggi, sedangkan ada yang tingkat pertumbuhannya negatif.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Studi ini menyelidiki pengaruh derajat desentralisasi fiskal, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) pada 8 Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2023. Ruang lingkup penelitian dibatasi guna memudahkan penyelesaian masalah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas.

Oleh karena itu, didalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah pada hal-hal berikut ini:

1. Data poin IPM yang dikumpulkan berdasarkan Provinsi di Indonesia dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik ) Indonesia.
2. Pengambilan data untuk menyusun I-HDI berdasarkan Provinsi di Indonesia, dan dipublikasikan oleh BPS Indonesia.
3. Data pendapatan daerah dikumpulkan dari semua Provinsi di Indonesia dan dipublikasikan oleh DJPK (Direktorat Jendral Keuangan Keuangan) Indonesia.
4. Data dana perimbangan diperoleh dari data APBD, yang dipublikasikan dari BPS Indonesia.
5. Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data PDRB atas dasar harga konstan, yang dipublikasikan dari BPS Indonesia untuk setiap Provinsi-Provinsi Indonesia.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan bersumber dari latar belakang, penulis menyusun rumusan penelitian yaitu antara lain:

1. Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023?.
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023?.

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023?.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tertulis antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023?.
2. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023?.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI Pada 8 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023?.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk peneliti, dan masyarakat luas yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- a. Pada penelitian ini dapat menunjang mengembangkan teori pembangunan manusia, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Dengan menganalisis bagaimana variabel-variabel penelitian yang diteliti saling berkaitan, dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai komponen yang mempengaruhi pembangunan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan empiris dalam menguji validitas dan relevansi teori-teori yang telah ada terkait dengan hubungan antarvariabel yang dikaji. Hasil penelitian ini akan memberikan validasi atau koreksi terhadap teori-teori tersebut.
- c. Penelitian ini dapat diaplikasikan untuk menguji dan mengembangkan model ekonomi syariah,

khususnya yang berkaitan terhadap kesejahteraan manusia dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal.

- d. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai relasi antara desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi, serta implikasinya terhadap pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam.
- e. Penelitian ini meningkatkan pengetahuan tentang proses pembangunan regional di Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi yang diteliti, serta bagaimana kualitas hidup masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan fiskal.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Pada penelitian ini berpotensi berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efisien oleh pemerintah. Dengan memahami komponen-komponen yang memengaruhi I-HDI, pemerintah dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan alokasi dana perimbangan.
- c. Penelitian ini dapat berkontribusi pemerintah daerah dalam merencanakan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan bermanfaat untuk masyarakat. Dengan mengetahui semua komponen yang mempengaruhi I-HDI di daerahnya, pemerintah daerah dapat membuat

rencana pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.

- d. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan untuk referensi dalam merancang program-program pembangunan berbasis prinsip-prinsip syariah, sehingga lebih sesuai dan diterima oleh masyarakat setempat.
- e. Pemerintah daerah dapat mengaplikasikan hasil penelitian untuk merancang program pembangunan yang komprehensif dan inklusif, dengan memperhatikan aspek-aspek spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi..
- f. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada 8 Provinsi di Indonesia yang diteliti melalui penerapan kebijakan dan program yang lebih terarah dan berbasis bukti.
- g. Penelitian ini dapat mempromosikan penggunaan I-HDI sebagai alat ukur alternatif atau pelengkap dari konvensional, yang lebih relevan dengan konteks dan nilai-nilai masyarakat Islam.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI pada 8 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua, pada periode 2018 hingga 2023. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui penerapan metode *System Generalized Method of Moments (SYS-GMM)*, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Variabel derajat desentralisasi fiskal menunjukkan nilai p-value sebesar 0,183 untuk jangka pendek dan 0,174 untuk jangka panjang, keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Koefisien jangka pendek sebesar -0,0013708 dan koefisien jangka panjang sebesar -0,1716217 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap I-HDI pada 8 provinsi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Variabel dana perimbangan menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 untuk jangka pendek dan 0,000

untuk jangka panjang, yang keduanya lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Koefisien jangka pendek sebesar -0,1102319 dan koefisien jangka panjang sebesar -0,1706072 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap I-HDI pada 8 provinsi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai p-value sebesar 0,022 untuk jangka pendek dan 0,034 untuk jangka panjang, yang keduanya lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Koefisien jangka pendek sebesar -0,0032166 dan koefisien jangka panjang sebesar -0,005302 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap I-HDI pada 8 provinsi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## 5.2 Keterbatasan Hasil Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian mengenai analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI pada delapan provinsi di Indonesia untuk periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu derajat desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Variabel-variabel ini belum sepenuhnya mencakup semua faktor yang memengaruhi peningkatan I-HDI. Penelitian ini belum mempertimbangkan variabel lain seperti inflasi, Belanja Daerah, Belanja Modal, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, dan Indeks Gini. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi I-HDI.

2. Penelitian ini hanya mencakup delapan provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Terdapat tersebut berada dalam kategori interval sedang *Human Development Index* (HDI) , dengan interval  $60 \leq \text{HDI} < 70$ , yang kemudian dihitung ulang menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Penelitian ini tidak mencakup seluruh provinsi di Indonesia, sehingga hal ini bisa membatasi generalisasi hasil penelitian ke provinsi lain yang tidak dijadikan objek penelitian.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian SYS-GMM yang bergantung pada beberapa asumsi penting, seperti tidak adanya korelasi serial dalam error terms dan pemilihan instrumen yang tepat. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil yang diperoleh bisa menjadi bias atau tidak konsisten. Pemilihan instrumen yang tidak tepat juga dapat menghasilkan estimasi yang kurang akurat. Meskipun SYS-GMM dirancang untuk mengatasi

masalah endogenitas, pemilihan instrumen yang valid dan relevan tetap merupakan tantangan. Instrumen yang kurang kuat atau tidak sesuai dapat mengurangi validitas hasil analisis. Penelitian ini hanya mencakup periode 2018-2023, sehingga hasilnya tidak mencerminkan dampak kebijakan yang baru diberlakukan setelah periode ini. Hasil penelitian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik periode waktu tersebut, seperti dampak pandemi COVID-19.

### **5.3 Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang berkaitan dengan analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI di 8 Provinsi pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap I-HDI mengindikasikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan saat ini belum efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui I-HDI. Pemerintah pusat dan daerah perlu meninjau kembali implementasi kebijakan desentralisasi, khususnya dalam alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan yang ada, agar lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata..

2. Pengaruh negatif signifikan dari dana perimbangan terhadap I-HDI menunjukkan tidak efektifnya alokasi pendanaan yang dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah penggunaan dana yang tidak efisien atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa dana perimbangan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan perubahan prosedur penyaluran dan pengawasan serta penguatan kemampuan pengelolaan pemerintah daerah.
3. Pengaruh negatif signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi bagi individu. Pertumbuhan yang tidak inklusif, dimana manfaat perekonomian tidak terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, mungkin menjadi penyebabnya. Untuk memberikan dampak positif terhadap I-HDI, pemerintah harus memastikan bahwa rencana pertumbuhan ekonomi lebih terfokus pada pengurangan kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja yang adil, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya.
4. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya berkonsentrasi pada kualitas pembangunan sosial selain alokasi anggaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inisiatif pembangunan perlu lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, serta ketersediaan dan

kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal.

5. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang lebih komprehensif dan lebih memperhatikan aspek pembangunan manusia selain statistik ekonomi. Memprioritaskan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangatlah penting, dengan fokus pada peningkatan kualitas indikator I-HDI.
6. Bagi Peneliti, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap I-HDI, sementara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan, mengisyaratkan perlunya peneliti untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin lebih relevan dalam mempengaruhi I-HDI, serta mempertimbangkan metode penelitian yang lebih canggih untuk menangkap dinamika yang lebih kompleks.
7. Bagi akademisi, hasil ini menekankan pentingnya menggabungkan temuan tentang efektivitas kebijakan fiskal dan ekonomi ke dalam materi pengajaran, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan penelitian yang dapat memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif.

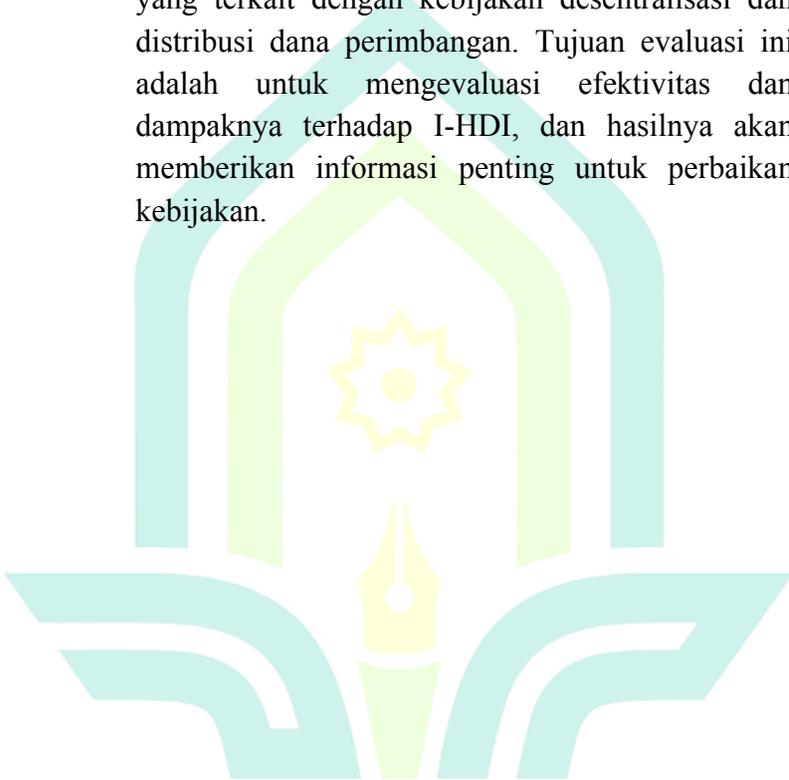
## 5.4 Saran

Beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terkait analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap I-HDI pada 8 Provinsi di Indonesia pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam, disarankan agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi I-HDI, seperti inflasi, belanja daerah, belanja modal, rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, serta indeks gini. Variabel-variabel ini dapat memberikan ilustrasi atau gambaran yang lebih lengkap mengenai komponen-komponen yang mempengaruhi I-HDI.
2. Merekomendasikan agar peneliti selanjutnya memperluas jangka waktu penelitian untuk mencakup periode yang lebih lama. Ini akan memungkinkan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari komponen yang mempengaruhi I-HDI.
3. Metode dalam penelitian ini yaitu *System Generalized Method of Moments* (SYS-GMM), yang memiliki kelemahan seperti kebutuhan untuk menghindari korelasi serial dalam error terms dan pemilihan instrumen yang tepat. Jika asumsi-asumsi ini tidak dipenuhi, hasilnya bisa menjadi bias atau tidak konsisten. Selain itu, pemilihan instrumen yang kurang tepat dapat mengakibatkan estimasi yang tidak akurat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan metode

alternatif atau membandingkan SYS-GMM dengan FD-GMM, serta metode lain seperti *Panel Vector Autoregression (P-VAR)*, *Panel Error Correction Model (P-ECM)*, atau metode lainnya guna mencapai analisis yang lebih optimal.

4. Disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap program-program yang terkait dengan kebijakan desentralisasi dan distribusi dana perimbangan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap I-HDI, dan hasilnya akan memberikan informasi penting untuk perbaikan kebijakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidillah, A. F., Ayuningtyas, R. D., & Cheumar, M. (2022). Measuring IHDI in Indonesia and How The Impact of Investment and Government Expenditure. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5931>
- Abraham, T. W., & Ahmed, U. A. (2011). Economic Growth and Human Development Index in Nigeria: An Error Correction Model Approach. *International Journal of Administration and Development Studies, University of Maidugur, Vol. 2. No*(Maret 2011), 1–23.
- AF, A. R. (2015). *Barometer Keuangan Negara/Daerah* (E. Susanto (ed.)). Andi Offset. [https://books.google.co.id/books?id=wpqKCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=wpqKCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Ajizah, S. D. N. (2022). *Analisis Kinerja Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Indonesia.
- Amir-Ud-Din, R. (2014). Maqāṣid Al-Sharīḥah : Are We Measuring the Immeasurable? *Islamic Economic Studies*, 22(2), 1–31. <https://doi.org/10.12816/0008093>
- Amir, A., Rafiqi, R., Amri, A. D., & Alissa, E. (2022). *Determinants of human development index and Islamic human development index regency / city of Jambi Province 2016 - 2020*. 1936.
- Anthony Hall, J. M. (2004). *Social Policy for Development*. Sage Publications Ltd.
- Anto, M., H. (2013). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies, Vol. 19 No.2, Life 1*, 69–95.

- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Asmuni. (2014). *Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem Al-Maqashid*. Universitas Islam Indonesia.
- Audah, J. (2013). *Maqashid Al-Shariah*. Suka Press.
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Ht Tp S : W Id // W W Ht Tp S : // W W W*. 8(2), 2004.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Badan Pusat Statistik Indonesia 2016*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024a). *Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Provinsi Di Indonesia 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU3IzI=/angka-harapan-lama-sekolah--hls--menurut-jenis-kelamin--tahun-.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024b). *Data Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAxIzI=/angka-harapan-hidup--ahh--menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin--tahun-.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024c). *Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024d). *Data Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.htm>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024e). *Data Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi--2020.html?year=2022>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024f). *Data Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran, 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/04/28/adbf2e4673599f3dbddca295/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-pengeluaran--2018-2022.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024g). *Data Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024h). *Data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Di indonesia Tahun 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin--tahun-.html>

Bappenas. (2007). *Tinjauan umum APBD Provinsi, Kabupaten Dan kota tahun 2006*.

Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia (Pertama)*. Kencana.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=697205>

Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.  
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20379757>

Chapra, U. (2000). *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (I. Abidin Basri (ed.)). Gema Insani Press.

Deca Pitron, L. (2013). *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2024a). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2024b). *Data Derajat Desentralisasi Fiskal Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023*. DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>

Dwi Lestari, & Nur Azlia Arumi. (2024). Factors that influence the Islamic Perspective Human Development Index as Evidence of the Development of the Muslim Community. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(2), 75–93.  
<https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>

Evans, R. W. (2018). Generalized Method of Moments. A Companion to Theoretical Econometrics. *Github*, 230–255.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470996249.ch12>

Fauziah, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *IYF AKR\_Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif.pdf* (p. 2).

- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. UPP Stim Ykpn. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=5y4KJOAAAAAJ&citation\\_for\\_view=5y4KJOAAAAAJ:IjCSPb-OGe4C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5y4KJOAAAAAJ&citation_for_view=5y4KJOAAAAAJ:IjCSPb-OGe4C)
- Frete, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Halim, A. (2002). *Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*. Salempa Empat. [https://books.google.co.id/books/about/Akuntansi\\_keuangan\\_daerah.html?hl=id&id=53xTNgAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Akuntansi_keuangan_daerah.html?hl=id&id=53xTNgAACAAJ&redir_esc=y)
- Harahap, R. U. (2018). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Daba Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara*. 2(7).
- Hasan, H., Ali, S. S., & Muhammad, M. (2018). Towards a Maqāṣid al-Sharī'ah based Development Index. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 08(01), 20–36. <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-002>
- Hasbi, M. Z. N., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). *A Conceptual Framework of The Islamic Human Development Index (I-HDI) and its Relationship with Maqāṣid Al-Sharī'ah*. 2019.
- Hasbi, & Wibowo, M. G. (2022). *Determinants of Islamic Human Development Index in OIC Countries With Good Governance as Moderating Variables*. 10(1), 173–198.
- Hidayanto, D. (2004). *Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka.
- Jhingan, M. . (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.

- Kadir, S., Abubakar, A., Haddade, H., Ihsan, A., & Nur, A. (2022). *Political stability, macro economics, and islamic human development index (i-hdi) in oic countries stabilitas politik, ekonomi makro, dan indeks pembangunan manusia islam (i-hdi) di negara oki*. 8, 245–253.
- Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid, W. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 23(1), 59–71. <https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.59-71>
- Lastiati, A., & Rachmawati, N. A. (2019). Stata for Beginners (Modul Pelatihan Universitas Trilogi). *Universitas Trilogi*.
- Lestari, P., & Fitriyati, D. (2011). *Pengaruh Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri*. 1–16.
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. STIM YKPN.
- Lubis, K. A. (2013). Penerapan Generalized Method of Moments Pada Persamaan Simultan Panel Dinamis Untuk Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Progam Magister Jurusan Statistika, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institute Teknologi Sepuluh November :Surabaya*, 1–146.
- Lubis, R. (2020). Analysis Relationship of Economic Growth, Fiscal Policies and Demographic to Islamic Human Development Index in Indonesia (Granger Causality Approach). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(1), 31–46. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2490>
- Lubis, R. N. P., Imsar, & Atika. (2023). *Pengaruh Produk*

*Domestik Bruto (PDRB), Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) Di Indonesia. 08(01), 1–13.*

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keem). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. [https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=4003&keywords=](https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4003&keywords=)

Mangkoesebroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. BPFE.

Mardianto, D. (2023). Analysis Of Determinants Of Islamic Human Development Index (I-Hdi) In Member Countries Of The Organization Of Islamic. *IEB JOURNAL Islamic Economics and Business Journal Vol., 5(1), 14–31.*

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi. [https://books.google.co.id/books/about/Otonomi\\_dan\\_manajemen\\_keuangan\\_daerah.html?hl=id&id=NI-OAAAAMAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Otonomi_dan_manajemen_keuangan_daerah.html?hl=id&id=NI-OAAAAMAAJ&redir_esc=y)

Mutiha, A. H. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). *KnE Social Sciences, 3(11), 609*. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792>

Nabilah, D., & Setiawan. (2016). Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Data Panel Dinamis dengan Pendekatan Generalized Method of Moment Arellano-Bond. *Jurnal Sains Dan Seni Its, 5(2), 2337–3520*.

Napitupulu, L. A. B. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Swasta Di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM Fekon, 4(1), 338–352*.

- Purwanto, E., Mardani, & Miyasto. (2021). *Analysis of Islamic Human Development Index Maqashid Syariah Perspective*. 4(02), 23–27.
- Putra, S. M., Manan, A., & Yuniarti, T. (2023). Socio-Economic and Humanistic Aspects for Analysis of the Influence of Regional Original Revenue Balancing Fund and Gross Regional Domestic Product on the Human Development Index in West Nusa Tenggara Province in 2008-2022 Analisis Pengaruh Pendapatan Asl. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry, Socio-Econ*, 332–339.
- Putri, R. M. (2019). Determinan Islamic Human Development Index (Ihdi) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1410–1420.
- Putu Gede Mahendra Putra, I. G. K. A. (2015). *Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia*. 3(12), 863–877.
- Rahim, Z. A., Sofyan, S., & Esya, L. (2022). *Human Development Index Analysis With Islamic Human Development Index (Ihdi) Approach In Dki Jakarta In 2010-2019*. 2(1), 133–146.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pub. L. No. 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 2Predicting the binding mode of flexible polypepti (1999).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32, Dpr 1 (2004). <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(1), 1–6.  
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>

- Rochmah, S., & Sukmana, R. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi Terhadap Islamic Human Development Index (Ihdi) Di Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(4).  
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp819-829>
- Rukiah, & Siregar, S. (2019). *Interactions And Contributions Between Islamic Human Development Index , Economic Growth , Fiscal Policy And Demographics In Indonesian Provinces : Panel Vector Autoregression ( P-Var ) Analisis. 1*, 347–367.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat DI Provinsi Papua Tahun 1997-2013. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(1993), 185–199. <http://eprints.upnyk.ac.id/871/>
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fikal dan Keuangan Daerah Dalam Ekonomi*. PT Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Ilham Jaya.
- Sembiring, R. W., Nurlinda, & Suryanto. (2024). The Influence of Balancing Funds and Original Regional Income on the Human Development Index and Poverty Levels in North Sumatra Province. *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)*, 3(4), 204–215. <https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v3i4.253>
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18–26. [Uny.ac.id](http://Uny.ac.id)
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan*

*Komunikasi*, 10(2), 342–362.  
<https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>

Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>

Suharno. (2019). Analisis Islamic Human Development Index ( I-HDI ) Indonesia ( Analisis Simultan Data Panel 33 Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2010-2018 ). In *Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.

Taurif, M., Otok, B. W., & Latra, I. N. (2014). Estimation of Generalized Method of Moment in Logistic Regression Model. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, November*, 167–174.

Todaro, M. (2011). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Erlangga.

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration, and Development*. MacMillan Press.

United Nations Development Programme. (1995). Human Development Report 1995. In *American Journal of Economics and Sociology* (Vol. 54, Issue 1). <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.1995.tb02630.x>

United Nations Development Programme. (2016). *Human Development Report 2016*.

Wang, Z., Danish, Zhang, B., & Wang, B. (2018). Renewable Energy consumption, Economic Growth and Human Development Index in Pakistan: Evidence Form Simultaneous Equation Model. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 184). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.260>

- Wardani, N. K. (2018). *Pengaruh Aset Daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)*.
- Widjaja. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. PT raja Grafindo Persada. <https://onesearch.id/Author/Home?author=HAW+Widjaja>
- Wulandari, A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 17–33. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5937>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah (Pertama)*. Deepublish. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=lc0widkAAAAJ&citation\\_for\\_view=lc0widkAAAAJ:9yKSN-GCB0IC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=lc0widkAAAAJ&citation_for_view=lc0widkAAAAJ:9yKSN-GCB0IC)
- Yani Rizal, I., & Ritonga, D. W. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(Vol 5 No 1), 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jse.v5i1.3445>
- Youssef, A. H., El-Sheikh, A. A., & Abonazel, M. R. (2014). Improving the Efficiency of GMM Estimators for Dynamic Panel Models. *MPRA Paper 68675, University Library of Munich, Germany, June*.